**BAB IV**

**ANALISIS REAKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA**

1. **Gambaran Ideal Masyarakat Madani**

Gerakan Masyarakat madani atau Civil Society merupakan fase baru yang terus menggelinding di Indonesia. Variannya berupa gerakan demokratisasi ditingkat masyarakat, yang melahirkan proses memperkuat daulat rakyat dihadapan daulat negara. Sementara di kalangan umat Islam makin gencar gerakan masyarakat Madani, yang muaranya ke arah pembentukan sipil Islam yang kuat.

Konsep masyarakat Madani atau Civil Society memang khas Barat, tetapi gerakannya dalam banyak varian terus bergulir di negara-negara Non-Barat atau Timur dan Selatan, termasuk di Indonesia. Di negeri ini gerakan Civil Society dapat dicandra melalui wacana atau peristilahan masyarakat warga atau kewargaan masyarakat sipil dan masyarakat Madani, selain istilah asli yakni Civil Society.

Masing-masing memiliki perspektif dan nuansa sosial politik dan ideologi yang di sana sini berbeda, tetapi hasil akhirnya menuju pada pembentukan masyarakat yang kuat, domokratis dan bermoral atau berkeadaban.

Konsep civil society dipopulerkan oleh Adam Ferguson (1723 –1816), untuk melukiskan sejarah masa lampau tentang masyarakat dan peradaban Barat yang otonom. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh para pemikir Barat kontemporer, hingga lahirnya negara-negara baru Eropa Timur. Jika dirujuk ke akar sejarahnya di zaman Yunani kuno, civil society memiliki dasar pada “Civitas dei” (Kota Tuhan).[[1]](#footnote-1)

Menurut Ernest Gellner, civil society adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Kemampuan mengimbangi tersebut artinya daya untuk membendung dominasi negara, kendati tidak mengingkari negara. Di sini Gellner mencoba memposisikan civil society vis a vis dengan negara, meskipun tidak eksterm harus terus menerus terjadi pertarungan antara Negara (state) dan rakyat (people). Semangatnya adalah penguatan dan pemberdayaan atau otonomisasi kekuatan masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Sedangkan Selligman mencoba merujuk civil society dalam konteks kelahiran dan keberadaannya terutama dalam tradisi masyarakat barat lahirnya gagasan civil society di dunia Barat diilhami oleh empat pemikiran utama yaitu :

 (1) Tradisi hukum kodrat atau hukum alam, yang meletakkan pentingnya peranan akal dalam kehidupan individu dan masyarakat setelah kejatuhan negara-Kota sebagaimana disuarakan Cicero.

(2) Doktrin Kristiani-Protestan, yang intinya bahwa tatanan masyarakat merupakan pencerminan dari tatanan ketuhanan.

(3) Faham kontrak sosial, yakni keberadaan, masyarakat atau negara lahir karena kesepakatan bersama akan hak-hak dasar yang harus dilindungi dan untuk tegaknya etik kemanusiaan,

 (4) Pemisahan

Gambaran ideal masyarakat Madani menurut penulis adalah harus melihat kepada sejarah perjuangan Nabi Muhammad saw (sirah nabawiyah) dalam menegakan Islam di Madinah. Karena suatu model masyarakat modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu terhimpun ada disana, di kota Madinah Nabi sebagai pemimpin tertinggi menegakan aturan hukum perundang-undangan, baik pada kalangan muslim maupun non muslim.

Sehingga Nabi membuat ketetapan guna mengatur berbagai ikatan yang terjalin di antara penghuni Madinah, aturan-aturan tersebut termaktub dalam undang-undang (Dustur) Piagam Madinah. Piagam ini berfungsi untuk memperjelas adanya keterikatan seluruh kelompok yang berada di kota Madinah dan juga menetapkan batasan-batasan hak serta kewajibannya

 Bunyi naskah perjanjian perdamaian persahabatan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw, dikala itu sebagaimana yang di riwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam Kitab Sirahnya yang di dalamnya menekankan tentang hak dan kewajiban seorang muslim, hak dan kewajiban seorang non muslim, persamaan dan persaudaraan, menegakan kebenaran dan keadilan, memberantas segala bentuk kejahatan baik pidana dan perdata.

Negara Madinah dituntut untuk Mengamankan para pengacau atau yang berbuat kerusakan, dimanapun berada serta setiap orang, suku dan warga Negara Madinah harus berkomitmen menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan Negara Madinah dari serangan pihak musuh manapun yang mengancamnya. [[3]](#footnote-3)

Masyarakat madani ialah masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum, yang disebut al-Khair. Masyarakat madani sering disamakan dengan masyarakat Islam.[[4]](#footnote-4)Menurut As. Siba’i, masyarakat Islam itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem masyarakat muslim adalah satu sistem kehidupan masyarakat yang berdaya maju, bergerak dan aktif, modern dan maju, serta bukan masyarakat zahid dan darwis yang memilih hidup melarat sebagai mana faham sufiyah.
2. Sistem masyarakat muslim mengakui dan menjamin hak asasi manusia dan perundang-undangan untuk adanya jaminan sosial membasmi kemelaratan, penjahat, kebodohan, pengecut dan rasa rendah diri.
3. Taraf kehidupan menurut sistem masyarakat Islam itu tinggi dan bermutu.
4. Sistem masyarakat muslim itu cocok untuk semua orang muslim dan non muslim karena dasar-dasar dan hak-hak menurut sistem ini merata kepada semua penduduk tanpa pengecualian.
5. Sistem masyarakat Islam mengikut sertakan rakyat bersama pemerintah dalam pelaksanaan urusan umum.
6. Sistem masyarakat Islam mudah untuk dibentuk, tidak kaku, dapat dipraktekkan setiap waktu, serta sesuai dengan perkembangan zaman dan gerak kemajuan.
7. Sistem masyarakat Islam merupakan gerak praktis dan undang-undang yang harus diturutinya tidak ubahnya seperti undang-undang pemerintah, sehingga bukan ide semata.
8. Sistem masyarakat Islam benar-benar merupakan dasar pokok dan dasar kerja bagi pemerintah dari negara Islam sejak berdirinya pada abad ke 7 M.[[5]](#footnote-5) Kini baik civil society maupun masyarakat madani memerlukan kerja-kerja strategis dan operasionalisasi, sehingga tidak sekedar agenda wacana belaka. Dengan kata lain civil society dan masyarakat madani harus benar-benar menjadi gerakan yang aktual dan transformasional, yang daya jelajahnya baik bersifat struktural menuju pada demokratisasi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem politik maupun gerakan bermasyarakat di tingkat rakyat, yang membangun kehidupan demokrasi yang bermoral dan berkeadaban. Segenap partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok kepentingan, dan kekuatan-kekuatan di akar rumput harus melakukan gerakan yang sinergi untuk membangun kehidupan demokrasi yang bermoral dan berkeadaban.

Pada intinya, untuk membentuk cita-cita masyarakat madani yang ideal harus dikembalikan kepada sistem aturan ilahiyah dalam al-qur’an yang kaffah dengan mengikuti pola perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Maka, begitu pentingnya mencontoh pola pergerakan Nabi Muhammad saw, berserta sahabat dan pengikutnya dalam menegakan Islam dari Mekkah hijrah Madniah .

Karena Negara Madinah Al-Munawaroh adalah suatu kota yang menegakan sistem aturan undang-undang, di dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk. Disanalah muncul keadilan, keamanan, kenyamanan dan di berkahi oleh Allah sebagai negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.

1. **Langkah-Langkah Strategis Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani**

 Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas, maka ada beberapa langkah-langkah strategis pendidikan Islam yang harus dilakukan secara optimal dan maksimal, yaitu:

Pertama, para pengelola pendidikan Islam senantiasa merespon terhadap aspirasi masyarakat dan dapat menterjemahkan secara cerdas dalam program- program pendidikan.[[6]](#footnote-6) Dengan kata lain, bahwa setiap unsur yang terlibat didalam proses pendidikan tersebut harus dengan sepenuh hati mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memikirkan apa yang harus diperbuat demi masa depan pendidikan dan umat Islam secara keseluruhan.

Seluruh team kerja hendaknya bekerja secara kompak dan bersama, antara lain dalam menyusun program-program kerja pendidikan dan rencana-rencana strategis (renstra) lainnya. Misalnya penyusunan kurikulum bidang studi yang dipandang sangat urgen dan signifikan untuk diterapkan berkenaan dengan kebutuhan peluang dan tantangan zaman serta perubahan masyarakat yang sedang berkembang dari dunia pertanian tradisional ke teknologi komunikasai industri yang modern.

Untuk itu perlu menekankan tentang pentingnya pendidikan agama Islam yang menitik beratkan tentang ketauhidan, keimanan yang benar, kewarganegaraan, komputer dan informatika, bahasa Internasional, dan lain-lain.

Kedua, ada kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasionalnya. Jadi visi-misi, kurikulum, metode dan sistem pendidikan sertarencana jangka pendek, menengah dan panjang yang telah di tuangkan dalam kebijkan ini meski selaras antara teori dan aplikasi untuk menjawab persoalan zaman yang terus berkembang setiap ruang dan waktunya.

Ketiga, Pendidikan Islam harus bisa membaca kondisi situsi perkembangan dunia ketiga, yaitu perkembangan informasi telekomunikasi, teknologi dan industrialisasi.

Berkat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang membawa dampak amat signifikan dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tak dapat diabaikan begitu saja. Suatu keharusan untuk mengakui akan berbagai macam benefit (kebaikan dan manfaat) yang dibawa oleh (IPTEK) terhadap kehidupan manusia, namun pada sisi yang lainnya juga harus kita tetap mewaspadai akan berbagai ekses negatif yang akan ditimbulkannya.

Oleh para pakar, ia kadang diibaratkan dengan dua sisi mata uang, sisi yang satu membawa berkah (manfaat), namun sisi yang lainnya membawa bencana (mudharat). Dengan melalui IPTEK tersebut, terjadi transformasi sosial (perubahan di dalam masyarakat) yang spektakuler, merubah taraf, posisi setiap bangsa dan negara di dunia, dari taraf negara agraris tradisional menjadi modern (maju) dalam Industrialisasi dan bahkan sampai mencapai taraf ketiga, yakni taraf era informasi dan telekomunikasi sebagaimana yang disinyalir oleh Alvin Toffler dalam buku “The Third Wave” (gelombang ketiga).[[7]](#footnote-7)

Memang bangsa kita secara kuantitatif adalah mayoritas beragama Islam, namun dari segi kualitatif masih sangat memprihatinkan. Dari sisi moral,nampaknya masih sangat rapuh dan pada dataran IPTEK masih jauh ketinggalan. Untuk memasuki era millenium abad XXI yang penuh tantangan tersebut memang sangat memerlukan stamina prima yang tidak mudah lelah. Saatnya sekarang dicanangkan agenda restorasi moral secara total bagi bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat Madani yang beradab, sebagai bagian yang integral dari keseluruhan aktivitas keseharian kita.

Selanjutnya, dampak industrialisasi yang lain adalah terjadinya urbanisasi besar-besaran, yakni perpindahan penduduk dari berbagai pelosok pedesaan menuju ke kota besar atau metropolitan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri, kebudayaan, dan sebagainya. Bagi mereka untuk mencari lapangan pekerjaan apa saja yang memungkinkan dapat melanjutkan kehidupan mereka atau tetap survive dari berbagai belenggu pertarungan dan demi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi generasi mereka di masa-masa yang akan datang.

Kompleksitas kehidupan baik di perkotaan dan perdesaan melahirkan suatu gaya hidup dan pemikiran baru yang disebut dengan urbanisme yaitu sikap dan cara hidup orang kota yang lebih banyak cenderung ke hal yang negatif dari pada ke hal yang positif, seperti: individualis, materialis, hedonis, kriminalis, teroris (Narkoba, seks bebas, Miras, Perjudian, pembunuhan, penipuan, pemalsuan) ekstremis, dan sebagainya.

Munculnya berbagai tindakan pelanggaran norma hukum di dalam masyarakat, seperti yang dibaca dan disaksikan setiap hari melalui masa, media cetak dan elektronika (Surat kabar, Majalah, TV, Media Sosial: Fb, Twitter, dsb). Itu merupakan suatu bentuk kejahatan tindak pidana dan perdata yang terjadi di masyarakat sebagai implikasi dan ekses negatif dari pada penyakit 6 K (kurangnya pemahaman dan pengamalan keimanan dan ketauhidan, kemiskinan, kebodohan, serta ketakberdayaan).

Maka, disinilah peran dan fungsi reaktualisasi pendidikan Islam untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan serta peluang dan tantangan zaman dunia ketiga. Oleh karena itu, di butuhkan suatu kerja sama yang terencana, sistematis dan terukur dari berbagai unsur masyarakat baik itu kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT/RW, Pendidik, Orang tua, pemuda) atau masyarakat lainnya. Semua elemen masyarakat harus memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab bersama-sama terhadap realitas sosial yang rusak.

Dalam konteks berbagai permasalahan di atas, maka jalan keluar dan solusi yang paling efisien dan efektif dilakukan oleh umat Islam adalah mereaktualisasikan peran dan fungsi agama secara optimal didalam kehidupan umat dan masyarakat melalui pendidikan Islam. Peran dan fungsi agama yang dimaksud adalah directiv sistem dan defensive sistem.[[8]](#footnote-8)

Dalam peran yang pertama yakni directive system, adalah agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan. Dengan demikian, agama akan dapat berfungsi sebagai supreme morality (moralitas tertinggi) yang memberikan landasan dan kekuatan etik spiritual masyarakat ketika mereka berdialektika dalam proses perubahan. Dengan pemahaman seperti ini, agama tidak lagi dipandang sebagai penghambat perubahan.[[9]](#footnote-9)

Dengan kata lain, agama menjadi daya dorong luar biasa bagi terciptanya perubahan ke arah coraknya yang konstruktif dan humanistik bagi masa depan umat manusia. Karena agama Islam memerintahkan nilai-nilai kebaikan seperti mengesakan/ tauhid kepada Allah, melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan haji. Serta melarang perbuatan-perbuat yang buruk seperti : Menyekutukan Allah, perzinahan, pembunuhan, pencurian, durhaka serta dusta dan durhaka kepada Allah.

Sedangkan peran agama yang kedua sebagai defensive system yaitu agama menjadi semacam kekuatan resistensial (perlawanan) bagi masyarakat ketika berada dalam lingkaran persoalan kehidupan yang semakin kompleks di tengah derasnya arus perubahan. Dalam konteks agama demikian, masyarakat akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dan tidak ada rasa keragu-raguan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Contohnya adalah masyarakat di wajibkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, kera keras dalam bekerja sehari-hari. Kemudian masyarakat muslim dan non muslim juga di tuntut untuk terampil kreatif dan inovatif dalam memecahkan persoalan kehidupan ekonomi, sosial dll. Maka, peran agama Islam begitu besar dalam melakukan perubahan yang nyata di masyarakat, karena spirit motivasi wahyu illahi dari Al-qur’an dalam kehidupan itu sangat berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Islam.

Kemudian juga Islam itu selalu menyuruh kebaikan, sebagaimana Allah dalam Al-Qur’an memerintahkan dakwah kepada umat manusia untuk kembali kepada-Nya. Maka, Semua unsur masyarakat harus melakukan gerakan dakwah amar ma’ruf nahyi mungkar, dalam rangka saling mengingatkan dan saling nasehat menasehati dalam kebenaran guna mewujudkan tatanan masyarakat Madani yang aman, damai di berkahi oleh Allah.

1. **Bentuk Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Hasil Reaktualisasi Pendidikan Islam**

Indonesia memiliki tradisi kuat sebagai Masyarakat Madami, bahkan lebih jauh sebelum Negara bangsa ini berdiri, sistem sosial budaya masyarakat sipil (Masyarakat Madani) ini telah di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia seperti: Adab Kesopanan, Saling menghormati dan menghargai, toleransi, gotong royong serta saling asih dan asuh masih melekat di sebagian masyarkat Indonesia.

Masyarakat sipil (Masyarakat madani) telah lahir dari rahim sejarah kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, serta kiprah beragam organisasi sosial keagamaan islam dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selain berperan sebagai organisasi perjuangan menegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan colonial, organisasi berbasis Islam seperti : Syarikat Islam (SI), Muhammadiyah, Matlaul Anwar (MA), Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al-Khairiyah telah menunjukan kiprahnya sebagai komponen yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil (Masyarakat Madani) di Indonesia.

Sifat kemandirian, keikhlasan dan kesukarelaan para pengurus dan anggota organisasi tersebut merupakan karakter khas dari sejarah masyarakat Madani di Indonesia. Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat Madani bias terwujud di Indonesia. Strateginya adalah di bawah ini :[[10]](#footnote-10)

Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktik demokrasi ala barat (demokrasi liberal) hanya akan berakibat konflik antara sesama warga bangsa vaik ekonomi, sosial, dan politik. Demokrasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga Negara, demokrasi hanya akan di pahami sebagai kebebasan tanpa batas yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial ekonomi, politik kemanan dna pertahanan Negara.

Kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam tataran ini, pembangunan institusi-institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh Negara disbanding pembangunan ekonomi. Model pengembangan demokrasi ini pun pada kenyataannya tidaklah menjamin demokratis berjalan sebagaimana layaknya. Kegagalan demokrasi di sejumlah Negara dalam banyak hal berhubungan dengan tingkat kemiskinan warga negaranya.

Ketiga, Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigm alternative di antara dua pandangan yang pertama, yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi. Berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga Negara, khususnya kalangan kelas menengah. Hal itu mengingat bahwa demokrasi membutuhkan topangan kultural, selain dukungan struktural.

Usaha-usaha pendidikan dan penyadaran politik warga Negara merupakan upaya membangun budaya demokrasi di kalangan warga Negara. Secara teoretis, upaya pendidikan dan penyadaran kelas menengah dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyadaran ideologis warga Negara, sebagaimana pernah disinggung oleh Gramsci (1891-1937).[[11]](#footnote-11)

Melalui proses pendidikan politik, diharapkan lahir tatanan masyarakat yang secara sosial ekonomi dan politik mandiri. Kemandirian mereka pada akhirnya akan melahirkan kelompok Masyarakat Madani yang mampu melakukan control terhadap hegemoni Negara.

Bersandar pada tiga paradigm di atas, pengembangan demokrasi dan Masyarakat Madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut. Sebaliknya, untuk mewujudkan Masyarakat Madani yang seimbang dengan kekuatan Negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma. Setidaknya tiga paradigm ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi dimasa transisi sekarang melalui cara :

1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok Masyarakat Madani yang mandiri secara politik dan ekonomi. Dalam pandangan ini, Negara harus menempatkan, diri sebagai regulator dab fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional. Tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan Negara mengurangi perannnya sebagai actor dominan dalam proses pembangunan Masyarakat Madani yang tangguh.
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Sikap pemerintah untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga Negara secara keseluruhan. [[12]](#footnote-12)Pendidikan politik uang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus menerus melalui keterlibatan semua unsur masyarakat melalui prinsip pendidikan demokratis. Yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga Negara. Maka pendidikan Islam memiliki tugas yang mulia serta kewajiban untuk menggerak, memotivasi, dan mendidik masyarakat untuk mewujudkan tatantan dunia baru bernama masyarakat Madani.

Mahasiswa merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan Masyarakat Madani, perang startegis maahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan rezim otoriter seharusnya di tindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokratisasi bangsa dan pengembangan Masyarakat Madani di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelas menengah, mahasiswa mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia. Sikap dan tanggung jawab itu dapat diwujudkan dengan pengembangan sikap-sikap demokratis, toleran, dan kritis dalam perilaku sehari-hari.

Sikap Demokratis salah satunya bisa di ekspresikan melalui peran aktif mahasiswa dalam proses pendemokrasian semua lapisan masyarakat melalui cara-cara dialogis, santun, dan bermartabat. Sikap toleran bisa ditunjukan, di antaranya dengan sikap menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan tradisi orang lain dengan kesadaran tinggi bahwa perbedaan adalah rahmat tuhan yang harus di syukuri, dipelihara, dan dirayakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap kritis dapat dilakukan dengan mengamati, mengkritisi dan mengontrol, pelaksanaan kebijakan pemerintah atau lembaga publik terkait, khususnya kebijakan yang berhubungan langsung dengan hajat orang banyak dan masa depan bangsa. [[13]](#footnote-13)

Sejalan dengan sikap ini. Keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu strategis bangsa, seperti mutu pendidikan, pendidikan murah, disiplin nasional, pemberantasan korupsi, KKN, isu-isu lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan iklim global (climate change), dan sebagainya. Sejak demokrasi menghajatkan partisipasi warga Negara menyuarakan aspirasi masyarakat secara santun dan tertib merupakan salah satu sumbangan penting bagi pembangunan demokrasi berkeadaban (civilitized democracy) di Indonesia. Demokrasi berkeadaban tidak mungkin tercapai tanpa praktek-praktek demokrasi yang santun di kalangan warga Negara. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lain merupakan sarana untuk mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia .

1. **Bentuk Reaktualisasi Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Di Indonesia**

 Dalam rangka reaktualisasi pendidikan Islam, maka sistem pendidikan Islam harus direformasi, direstrukturasi, dan di inovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman yang bebas. [[14]](#footnote-14)

1. Lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan sungguh-sunguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan global internasional. Disamping ilmu dan keterampilan tamatan lembaga pendidikan islam harus mampu berkomunikasi dalam bahasa asing terutama bahasa arab dan inggris. Untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjang oleh kepemimpinan yang tangguh, mandiri, serta mampu menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan peluang kerja.
2. Lembaga pendidikan Islam harus membuka program studi yang sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, minat bakatnya yang beraneka ragam, sehingga harus membuka berbagai jenis jurusan seperti program studi ilmu alam, ilmu sosial, ilmu bahasa, ilmu teknologi informasi, komunikasi dan komputer. Serta jurusan MAK, dan MAKJ, diantara prodi yang dapat dikembangkan di MAKJ adalah sebagai berikut : Perikanan, Pertanian, Kerajinan, Peternakan, Pekerjaan sosial, Busana, kecantikan, tata boga, perhotelan, Ekonomi, Akuntansi keuangan, Manajemen, Administrasi perkantoran, perkoperasian, kimia, perkapalan, Pariwisata, pelayaran, perdagangan, pertambangan teknik listrik, mesin, bangunan, otomotif, seni rupa, budaya dan olahraga. [[15]](#footnote-15)
3. Lembaga pendidikan Islam harus memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan (Futur Oriented) melalui analisis yang berkelanjutan tentang kecenderungan perubahan dan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sedang berubah-rubah dan berkembang ke depannya. Namun pada sisi lain lembaga pendidikan islam tetap mempertahankan ciri khasnya (identitasnya) yaitu nilai-nilai ketauhidan/ keimanan yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan demikian pendidikan Islam harus membumi dan mendunia untuk mewujudkan Masyarakat Madani yang Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. [[16]](#footnote-16)
4. Perlu danya sinergisitas kerja sama Departemen Agama dan pemerintah daerah (PEMDA) dalam penyelenggraan pendidikan Islam, Pemerintah Daerah bertanggung jawab pada aspek pembiyaan, kelembagaan, manajerial yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan Departemen Agama menyiapkan sistem pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang bersifat substansi dan ciri khas keislaman. [[17]](#footnote-17)
5. Manajemen administrasi keuangan yang transparan, akuntabilitas, serta terbuka untuk mewujudkan sekolah yang bebas dari penyelewengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Persoalan kurikulum, menurut pendekatan Teknologi informasi, bahwa keterbatasan dalam pendidikan sekarang ini adalah kurikulumnya. Entah anda menyukainya atau tidak, anda harus mempelajari semua pelajran yang telah ditetapkan. Ada siswa yang dipaksa melakukan apa-apa yang jelas-jelas bukan bidangnya, sehingga ia tidak mau mempelajarinya. Atau mungkin kita tidak perlu terlalu mendalami pelajaran tertentu. Kalau kita dapat menerapkan metode motivasi diri dan lebih fleksibel dalam penetapan kurikulum, kita bisa mengembangkan potensi para siswa sekaligus memungkinkannya mempelajari apa yang bermanfa’at secara praktis. Kita bisa mendamaikan kedua teori itu seandainya tanpa bantuan teknologi computer. Tetapi dengan bantuan teknologi komputer, hasilnya bahkan akan lebih baik lagi. Umpanya seorang siswa yang sangat berminat terhadap kendaraan bisa secara maya menanyakan profil dan harga mobol tersebut lewat komputer, sambil mengikuti segala prosedur pemeliharaan kendaraan. Dengan kata lain, bahwa dengan mengggunakan TI, maka kurikulum yang diterapkan dalam kegiatan pendidikan tidak lagi bersifat tertutup, melainkan lebih bersifat terbuka. Kurikulum yang dirancang tidak lagi terbatas kepada materi yang ditetapkan oleh sekolah, melainkan lebih luas, dirancang dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Keadaan ini mengharuskan para guru membuat semacam perjanjian atau kontrak belajar dengan para siswa sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan.[[18]](#footnote-18)
7. Dalam persoalan yang berkaitan dengan praktek pendidikan Islam perlu dilakukan perubahan reaktualisasi paradigma sebagai berikut :
8. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan harus profesional, kompeten, kredibilitas, kapabilitas secara holistik.
9. Pegawai staff Tata Usaha, administrasi sekolah, bagian kurikulum, bendahara keuangan, petugas perpustakaan, pesuruh (Office boy), penjaga sekolah, satpam dan sebagainya.
10. Melakukan reformasi, rekonstruksi sistem pembelajaran guru yang efektif, efisien dan menyenangkan anak didik.
11. Pendidik/ Guru adalah sebagai fasilitator dan motivator yang dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar.
12. Demokratisasi dalam proses pembelajaran, hal tersebut akan mmeberikan kepada peserta didiki untuk mengembangkan potensi dan hobinya. [[19]](#footnote-19)
13. Agar lulusan lembaga pendidikan Islam memiliki keunggulan di segala bidang keilmuan yang ambilnya. Agar lulusannya dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan teknologi informasi komunikasi, ilmu pengetahuan, seni budaya yang berkembang di dunia ke tiga ini atau abad ke 21.
14. Adanya relevansi antara input dan output yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di daerahnya. Maka bagian kurikulum harus mampu mengakomodir masukan saran dan kritik dari masyarakat untuk kebutuhan peserta didik.
15. Model pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola piki bahwa nilai-nilai lama yang konservatif dan asketis harus dilestarikan dalam sosok pribadi muslim yang resistan terhadap pukulan gelombang zaman, Itu merupakan ciri utama pendidikan esensialistik, orientasi demikiabn sudah tentu kurang dapat diandalkan oleh umat Islam untuk menjawan tantangan zaman. Nasihat ali bin Abi thalib ra [[20]](#footnote-20)yang menegaskan :

*“Didiklah anak kalian tidak seperti yang dididiikan kepada kalian sendiri, karena itu mereka diciptakan untuk genarasi zaman yang berbeda dengan zaman kalian”.*

1. Jika pendidikan islam berorientasi kepada masa depan sosio, masa depan tekno, dan masa depan bio, dimana ilmu dan teknologi menjadi pelaku perubahan dan pembaharuan sosial, maka pendidikan Islam yang bercorak teknologi, dimana-mana nilai samawi, ditinggalkan diganti dengan nilai-nilai pragmatiok realivistik kultural. Akan tetapi jika pendidikan Islam yang berorientasi kepada perkembangan masyarakat berdasarkan proses dialogis dimana manusia ditempatkan sebagai Geiger counter, pendeketeksi sinar radioaktif elemen-elemn sosial yang berpotensi kontroversial ganda. Yaitu membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat madani yang penuh berkah ilahi.

Kemudian lembaga pendidikan Islam memiliki peran besar untuk memecahkan persoalan sosial, ekonomi, budaya, moral dan hukum yang sedang di alami oleh bangsa ini. Karena, pada dasarnya Islam itu mengatur segala aspek hidup dan kehidupan umat manusia, baik dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Semoga reaktualisasi pendidikan islam dapat menjawab berbagai tantangan zaman guna mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan di berkahi

1. 1. Lihat Ernest Gellner, Condition of Liberty, Civil Society and Its Rivals , edisi Indonesia; “Membangun Masyarakat Sipil” oleh Ilyas Hasan, Cet. I, Bandung: Mizan, 1995, h. IX. [↑](#footnote-ref-1)
2. . Ubaidillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani. Cetakan 11, ICCE UIN Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014 hal. 217-219. [↑](#footnote-ref-2)
3. Moenawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilis 1, Cetakan pertama, Gema Insani, Jakarta, tahun 2001. Hal 430,431 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Pengantar Sosiologi dan Sosiografi), Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 126. Juga Wahbah Zuhaili, al Qur’an al Karim Bunyatuhu al Tasyri’iyat wa Khashaaishuhu al Hadhariyat, edisi Indonesia: “Alquran; Paradigma Hukum dan Peradaban” oleh: M. Lukman Hakim dan M. Fuad Hariri. Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995. h. 6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Yusuf al Qardhawy. Op.cit. h. 25 [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Tabrani dan Syamsul Arifin, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi, Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan , cet I, Yogyakarta: Sipress, 1994, h. 96. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Alvin Toffler, Future Shock, New York: Bantam Book, 1976. h. 20 Bandingkan, Jalaluddin Rahmat, “Islam Menyongsong Peradaban Gelombang Ketiga”, Ulumul Qur’an (jurnal) vol. 2. 1989, bandingkan Jalaluddin Rahmat, “Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim”, Cet. V, Bandung: Mizan, 1993, h. 70. Lihat juga Iskandar Alisyahbana (ed), Perubahan, Pembaharuan dan Kesadaran Menghadapi Abad XXI, Jakarta: Dian Rakyat, 1988, h. 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat, Thomas F. O’dea, Sociology Of Religion (terjemahan), Jakarta: Rajawali, 1987, h. 19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif, Bandung: Mizan, 1991, h. 30. [↑](#footnote-ref-9)
10. . Ibid, hal. 228 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, 228 [↑](#footnote-ref-11)
12. . Ibid, hal. 229 [↑](#footnote-ref-12)
13. . Ibid, hal. 230 [↑](#footnote-ref-13)
14. . Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam, Kalam Mulia, cet, 10 Jakarta. 2013, hal 488 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hal. 489 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, hal 489 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, hal. 490 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan pendekatan multidisipliner, cetakan 1, Rajawali press, Jakarta, 2009, hal. 262 [↑](#footnote-ref-18)
19. . Ibid, hal. 491-492 [↑](#footnote-ref-19)
20. . Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, edisi revisi Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 33 [↑](#footnote-ref-20)